



EVALUATION OF HEALTH SERVICE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS POLICY THROUGH PERFORMANCE BASED BUDGETING AND QUALITY CONTROL OF HEALTH SERVICES: A LITERATURE REVIEW

LITERATURE REVIEW: EVALUASI KEBIJAKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LAYANAN KESEHATAN MELALUI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN

Assyifa Ramadhani¹⁾; Reynanda Sabrina²⁾; Robby Firmansyah³⁾; Riswandy Wasir⁴⁾

¹⁾ ramadhaniassyifa20@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ reynandasbrnn@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³⁾ robby.firmansyah177@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴⁾ riswandywasir@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The efficiency and effectiveness of health services represent one of the critical aspects in the management of public services, particularly in budget utilization and the implementation of health programs. Numerous studies indicate that performance-based budgeting and quality control of health services exert a significant influence on enhancing accountability as well as service quality within public service institutions. This literature review was conducted to evaluate the implementation of efficiency and effectiveness policies in health services through a performance-based budgeting approach and quality control of health services. The study employs a literature review method, with data sources obtained from Google Scholar and Garuda. The articles utilized are scientific journals addressing performance-based budgeting, service effectiveness, performance accountability, and quality control of health services. The findings of the review demonstrate that performance-based budgeting is capable of improving the effectiveness of service management and the accountability of public service institutions. Furthermore, quality control of health services, strengthening of reporting systems, and information technology support also contribute to the enhancement of service quality. Nevertheless, policy implementation continues to face several obstacles, including low human resource capacity, weak internal control mechanisms, and the suboptimal integration of reporting systems.

Keywords: *Accountability; Performance-Based Budgeting; Quality Control of Health Services; Service Effectiveness; Service Efficiency*

Abstrak

Efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan pelayanan publik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan memiliki pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas serta kualitas layanan pada instansi pelayanan publik. Literature review ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan efisiensi dan efektivitas layanan melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan. Penelitian menggunakan metode literature review dengan sumber data yang diperoleh dari Google Scholar dan Garuda. Artikel yang digunakan merupakan jurnal ilmiah yang membahas penganggaran berbasis kinerja, efektivitas layanan, akuntabilitas kinerja, dan pengendalian mutu pelayanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan dan akuntabilitas instansi pelayanan publik. Selain itu, pengendalian mutu pelayanan, penguatan sistem pelaporan, serta dukungan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengendalian internal, serta belum optimalnya integrasi sistem pelaporan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Efektivitas Pelayanan; Efisiensi Layanan; Penganggaran Berbasis Kinerja; Pengendalian Mutu Pelayanan

PENDAHULUAN

Efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan menjadi isu strategis dalam pengelolaan



sistem kesehatan modern, terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat. Efisiensi dalam layanan kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai penghematan biaya, tetapi juga sebagai kemampuan sistem dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output layanan yang berkualitas dan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana layanan yang diberikan mampu mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan. Organisasi kesehatan global seperti World Health Organization dan Organisation for Economic Co-operation and Development menekankan pentingnya integrasi pengukuran kinerja, pengendalian mutu, serta evaluasi teknologi kesehatan dalam mendukung kebijakan kesehatan yang akuntabel dan berbasis bukti (OECD, 2020; World Health Organization, 2023). Dalam konteks Indonesia, total pengeluaran kesehatan yang masih relatif rendah dibandingkan negara lain menuntut adanya optimalisasi penggunaan anggaran melalui pendekatan value-for-money agar setiap pembiayaan mampu menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas (World Health Organization, 2020).

Permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah terjadinya duplikasi program dan ketidakterpaduan sistem data, seperti pada pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang dalam evaluasinya menunjukkan permasalahan pada proses pengumpulan data, keterbatasan sumber daya manusia untuk entry data, serta belum optimalnya koordinasi dan sistem pelaporan yang berpotensi menyebabkan inefisiensi pelaksanaan program (Nia, 2022; Novianti et al., 2020). Selain itu, variasi mutu pelayanan antar fasilitas kesehatan juga masih menjadi tantangan yang signifikan. Implementasi kebijakan kendali mutu dan biaya pada era Jaminan Kesehatan Nasional belum memberikan dampak yang konsisten terhadap peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam penanganan hipertensi (Hasri & Djasri, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian mutu pelayanan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan optimal akibat perbedaan kapasitas, sumber daya, serta lemahnya integrasi evaluasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, kebijakan kesehatan berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang belum mampu menghasilkan perbaikan mutu layanan secara nyata. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya masih membahas aspek penganggaran berbasis kinerja, Health Technology Assessment (HTA), maupun indikator mutu pelayanan secara terpisah. Kajian mengenai penganggaran berbasis kinerja lebih banyak menitikberatkan pada akuntabilitas penggunaan anggaran, sedangkan penelitian mengenai mutu layanan berfokus pada indikator struktur, proses, dan outcome pelayanan (OECD, 2020). Sementara itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan dalam satu kerangka evaluasi kebijakan kesehatan yang menyeluruh. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut melalui literature review agar diperoleh sintesis bukti yang mampu menjelaskan hubungan antara efisiensi anggaran, efektivitas layanan, dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, literature review ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi dan efektivitas layanan melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana integrasi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi mutu pelayanan dapat mendukung peningkatan kinerja sistem kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan karena menghubungkan aspek penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan dalam satu pembahasan yang terintegrasi,



sehingga evaluasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, hasil literature review ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review untuk memetakan bukti ilmiah mengenai evaluasi kebijakan efisiensi dan efektivitas layanan melalui penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi serta menelaah berbagai penelitian yang membahas implementasi penganggaran berbasis kinerja, efektivitas dan efisiensi anggaran, pengendalian internal, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga menyoroti berbagai strategi pengelolaan anggaran dan pengendalian mutu pelayanan yang telah diterapkan di instansi pemerintah maupun organisasi pelayanan publik sebagai bahan pembelajaran dalam upaya peningkatan efektivitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Google Scholar dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “Penganggaran Berbasis Kinerja”, “Efektivitas dan Efisiensi Anggaran”, “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, “Pengendalian Internal”, “Pelayanan Publik”, “Evaluasi Kinerja”, dan “Pemerintah Daerah” dengan menggunakan operator Boolean AND dan OR. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah full text yang dipublikasikan pada tahun 2021–2026, membahas penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan dalam konteks instansi pemerintah atau organisasi pelayanan publik, serta berkaitan dengan aspek efektivitas dan efisiensi anggaran, akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, evaluasi kinerja, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, tidak tersedia dalam bentuk full text, bukan merupakan artikel ilmiah peer-reviewed, artikel yang diterbitkan di luar rentang tahun yang ditentukan, serta artikel duplikat. Artikel yang memenuhi kriteria selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi temuan utama serta memetakan bukti ilmiah terkait efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan dalam meningkatkan efisiensi layanan dan akuntabilitas organisasi sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi literatur, artikel yang relevan dengan topik penelitian ini disusun dan disajikan dalam tabel berikut.

Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
(Israr & Syofyan, 2022)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kuantitatif	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja ($\beta=0.412$, $p<0.05$). Good governance juga berpengaruh signifikan ($\beta=0.384$, $p<0.05$). Variabel penghambat utama yang teridentifikasi adalah rendahnya kualitas SDM perencana anggaran dan lemahnya sistem pelaporan kinerja. Secara bersama-sama kedua



			variabel menjelaskan 58.17% varian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
(Marselia & Ardhiarisca, 2023)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada RSUD Sidoarjo)	Kuantitatif	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja RSUD Sidoarjo (t -hitung $4.87 > t$ -tabel 2.00). Empat dimensi PBK (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi) berjalan dengan baik terbukti dengan raihian predikat Peringkat 1 Role Model Pelayanan Publik dan SAKIP terbaik 2023. Implikasi perbaikan: integrasi sistem informasi antara RKA dan SIMRS untuk mempercepat pelaporan kinerja real-time.
(Wangi & Lasniroha, 2023)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian pada Pemerintah Daerah Bandung	Kuantitatif	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian ($R^2=0.512$). Faktor penghambat utama: lemahnya kejelasan indikator output dan minimnya evaluasi pasca-program. Faktor pendukung: komitmen pimpinan dan ketersediaan sistem e-budgeting. Penelitian menyarankan penguatan mekanisme reward-punishment berbasis capaian indikator sebagai langkah perbaikan pengendalian.
(Azzahra & Kurniawan, 2025)	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung	Kuantitatif	SAPD berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.361$) dan PBK berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.429$) terhadap akuntabilitas kinerja. Secara simultan keduanya berkontribusi 62.3% terhadap akuntabilitas. Kualitas SAKIP Kabupaten Bandung meningkat dari predikat B menjadi BB setelah penguatan integrasi SAPD-PBK. Implikasi: penyempurnaan modul pelaporan kinerja berbasis data real-time sebagai prioritas reformasi.
(Attamimi & Lestari, 2023)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan	Kuantitatif	Penerapan PBK berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD ($R^2=0.493$, $p=0.000$). Dari keempat dimensi PBK, evaluasi kinerja memiliki koefisien terbesar ($\beta=0.312$) namun paling lemah diterapkan karena absennya standar pengukuran outcome. Faktor penghambat: SDM dengan kompetensi rendah di bidang perencanaan berbasis kinerja dan lemahnya budaya evaluasi. Rekomendasi: pelatihan terstruktur dan penerapan cascading indikator kinerja.
(Krisnanda & Anwar, 2024)	Faktor-Faktor Penentu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: Dari Anggaran hingga Sistem Pelaporan	Kuantitatif	Perencanaan PBK ($\beta=0.312$), pengendalian internal ($\beta=0.287$), dan sistem pelaporan ($\beta=0.356$) masing-masing berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Budaya organisasi terbukti memoderasi (memperkuat) hubungan sistem pelaporan dengan akuntabilitas (β interaksi= 0.198). Implikasi perbaikan: pembangunan budaya berbasis kinerja melalui internalisasi nilai akuntabilitas dalam SOP kerja harian.



(Anggraeni & Saleh, 2020)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kota Bandung)	Kuantitatif	Penerapan PBK berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kota Bandung ($R^2=0.467$, $t\text{-hitung}=6.52$). Dimensi pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan faktor paling lemah dengan rata-rata skor 3.1/5. Faktor penghambat: kurangnya koordinasi antara unit kerja dalam penyusunan laporan kinerja dan belum optimalnya sistem SAKIP. Rekomendasi: revidi berkala indikator kinerja utama (IKU) setiap triwulan.
(Mauliya et al., 2024)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Kuantitatif	Penerapan PBK berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Kab. Aceh Utara ($\beta=0.521$, $R^2=0.448$). Pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja merupakan dimensi terkuat, sementara perencanaan anggaran masih lemah karena dokumen Renstra belum sepenuhnya berbasis outcome. Hambatan: budaya anggaran berbasis input yang masih kuat di kalangan perencana. Rekomendasi: penguatan kapasitas penyusunan indikator outcome.
(Mikoshi, 2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok)	Kuantitatif	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.412$) dan akuntansi sektor publik berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.358$) terhadap akuntabilitas kinerja OPD. Kejelasan sasaran menjadi faktor paling dominan; ketidakjelasan target menjadi akar masalah rendahnya akuntabilitas. Implikasi perbaikan: penetapan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) pada setiap program/kegiatan.
(Lukito et al., 2024)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi Anggaran, Disiplin Anggaran, dan Efisiensi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah	Kuantitatif	Keempat variabel independen (PBK, transparansi, disiplin, efisiensi anggaran) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah ($F\text{-hitung}=14.72$, $R^2=0.681$). Efisiensi anggaran memiliki koefisien terbesar ($\beta=0.342$), mengonfirmasi bahwa penggunaan sumber daya secara optimal adalah kunci akuntabilitas. Penghambat: budaya mark-up anggaran dan lemahnya pengendalian internal. Rekomendasi: penguatan SPIP dan peningkatan peran APIP dalam audit berbasis kinerja.

Sumber: Data diolah dari berbagai literatur (2026)

Gambaran Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi-Efektivitas Layanan melalui Penganggaran Berbasis Kinerja dan Mutu

Secara umum, penganggaran berbasis kinerja (PBK) di Indonesia telah diterapkan di berbagai tingkatan pemerintahan dan terbukti memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan akuntabilitas layanan publik. Penelitian di SKPD Kota Bandung menunjukkan bahwa penerapan PBK berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai $R^2=0.467$, namun dimensi pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi titik terlemah dengan rata-rata skor 3.1/5 (Anggraeni & Saleh, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian di OPD Kabupaten Pamekasan menemukan bahwa dari keempat dimensi PBK, evaluasi kinerja memiliki koefisien terbesar ($\beta=0.312$) namun paradoksnya merupakan dimensi yang paling



lemah diterapkan, terutama karena belum adanya standar pengukuran outcome yang baku (Attamimi & Lestari, 2023).

Di level instansi layanan kesehatan, gambaran pelaksanaan PBK menunjukkan hasil yang lebih menggembirakan. Penelitian pada RSUD Sidoarjo membuktikan bahwa keempat dimensi PBK perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi berjalan dengan baik, yang terbukti dari raihan predikat Peringkat 1 Role Model Pelayanan Publik dan nilai SAKIP terbaik tahun 2023 (Marselia & Ardhiarisca, 2023) Sementara itu, penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memperlihatkan bahwa integrasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dengan PBK secara simultan berkontribusi sebesar 62.3% terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, dan terbukti mendorong kenaikan predikat SAKIP dari B menjadi BB (Azzahra & Kurniawan, 2025).

Pada ranah pengendalian, penelitian di Pemerintah Daerah Kota Bandung mengonfirmasi bahwa penerapan PBK berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian dengan $R^2=0.512$, di mana ketersediaan sistem e-budgeting menjadi faktor pendukung utama yang memperkuat pengendalian anggaran (Wangi & Lasniroha, 2023). Secara keseluruhan, gambaran pelaksanaan PBK di Indonesia menunjukkan tren positif, namun konsistensi implementasi masih sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan kualitas sistem pelaporan yang tersedia.

Faktor Penghambat dan Pendukung yang Memengaruhi Pencapaian Efisiensi dan Pengendalian Mutu Layanan

Berbagai penelitian empiris secara konsisten mengidentifikasi dua kluster faktor yang memengaruhi keberhasilan PBK dan pengendalian mutu layanan, yakni faktor penghambat dan faktor pendukung. Dari sisi faktor penghambat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi temuan yang paling berulang, persoalan SDM ini diperparah oleh lemahnya kejelasan sasaran anggaran. Kabupaten Solok membuktikan bahwa ketidakjelasan target merupakan akar masalah utama rendahnya akuntabilitas kinerja, karena tanpa target yang SMART pengelola anggaran tidak memiliki acuan pengukuran yang jelas (Mikoshi, 2020). Selain itu, budaya anggaran berbasis input yang masih mengakar kuat juga menjadi penghambat signifikan, sebagaimana teridentifikasi di Kabupaten Aceh Utara di mana dokumen Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada outcome (Mauliya et al., 2024). Tidak hanya itu, lemahnya pengendalian internal dan praktik mark-up anggaran turut menghambat pencapaian efisiensi yang optimal (Lukito et al., 2024).

Di sisi faktor pendukung, komitmen pimpinan organisasi terbukti menjadi penentu utama keberhasilan. Penelitian di SKPD Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Bandung sama-sama menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan ketersediaan sistem e-budgeting merupakan pendukung terkuat efektivitas pengendalian (Anggraeni & Saleh, 2020; Wangi & Lasniroha, 2023). Lebih jauh, penelitian di Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya menemukan bahwa budaya organisasi yang kuat secara signifikan memoderasi dan memperkuat hubungan antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja (β interaksi=0.198), yang berarti internalisasi nilai akuntabilitas dalam keseharian kerja mampu mengamplifikasi efek positif sistem pelaporan (Krisnanda & Anwar, 2024). Good governance juga terbukti menjadi faktor pendukung penting di Provinsi Sumatera Barat dengan kontribusi sebesar 58.17% secara bersama-sama dengan PBK terhadap akuntabilitas kinerja instansi (Israr & Syofyan, 2022).

Implikasi Perbaikan Kebijakan untuk Memperkuat Evaluasi Berbasis Kinerja dan Mutu Pelayanan

Berbagai penelitian empiris yang telah dikaji menunjukkan beberapa implikasi kebijakan yang saling menguatkan dan perlu mendapat perhatian serius. Penguatan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda. Penelitian di OPD Kabupaten Solok secara eksplisit merekomendasikan penetapan indikator



kinerja yang SMART pada setiap program dan kegiatan (Mikoshi, 2020), sementara penelitian di Kabupaten Pamekasan menekankan perlunya penguatan kapasitas perencana melalui pelatihan terstruktur dan penerapan cascading indikator kinerja dari level strategis hingga operasional (Attamimi & Lestari, 2023). Kedua rekomendasi ini saling melengkapi karena indikator yang baik di level dokumen harus disertai kemampuan SDM yang memadai untuk menerjemahkannya ke dalam kegiatan nyata. Di Kabupaten Aceh Utara, perbaikan ini bahkan lebih mendesak mengingat budaya anggaran berbasis input yang masih dominan di kalangan perencana (Mauliya et al., 2024).

Selain itu, integrasi sistem informasi dan digitalisasi pelaporan kinerja juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Penelitian di RSUD Sidoarjo merekomendasikan integrasi sistem informasi antara RKA dan SIMRS untuk mempercepat pelaporan kinerja secara real-time (Marselia & Ardhiarisca, 2023), dan penelitian di Kabupaten Bandung menegaskan bahwa penyempurnaan modul pelaporan kinerja berbasis data real-time harus menjadi prioritas reformasi anggaran (Azzahra & Kurniawan, 2025). Digitalisasi ini juga terbukti relevan dalam konteks efektivitas pengendalian, di mana sistem e-budgeting telah nyata mendukung pengendalian anggaran yang lebih ketat di Kota Bandung (Wangi & Lasniroha, 2023). Dengan demikian, investasi pada infrastruktur digital bukanlah sekadar modernisasi administratif, melainkan prasyarat struktural bagi efisiensi dan mutu pelayanan publik.

Di sisi pengawasan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi implikasi kebijakan yang paling mendasar. Penelitian dengan cakupan variabel paling lengkap menemukan bahwa efisiensi anggaran memiliki koefisien pengaruh terbesar ($\beta=0.342$) terhadap akuntabilitas, dan merekomendasikan penguatan SPIP disertai peningkatan peran APIP dalam audit berbasis kinerja bukan sekadar audit kepatuhan sebagai langkah perbaikan sistemik (Lukito et al., 2024). Rekomendasi ini diperkuat oleh temuan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja ($\beta=0.287$), dan bahwa budaya organisasi yang kondusif akan mengamplifikasi dampak positif pengendalian tersebut (Krisnanda & Anwar, 2024). Oleh karena itu, transformasi APIP dari watchdog menjadi konsultan kinerja merupakan langkah strategis yang perlu segera diwujudkan dalam kebijakan pengawasan pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil literature review, penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan menunjukkan pengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi layanan pada instansi pelayanan publik. Penerapan penganggaran berbasis kinerja membantu meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperbaiki sistem pelaporan, serta mendukung pengelolaan pelayanan yang lebih terarah. Di sisi lain, pengendalian mutu pelayanan juga berperan dalam menjaga kualitas pelayanan agar sesuai dengan tujuan organisasi pelayanan publik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan anggaran, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam menjalankan proses pengawasan dan evaluasi pelayanan.

Selain itu, integrasi sistem informasi dan penguatan pengendalian internal menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas layanan publik. Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, proses pengawasan dan evaluasi pelayanan dapat berjalan lebih baik sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Saran



Instansi pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan agar pelaksanaan program dan pengendalian mutu pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan sistem pengendalian internal, evaluasi kinerja secara berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan pengendalian mutu pelayanan pada sektor pelayanan publik lainnya dengan cakupan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). In *Indonesian Accounting Research Journal* (Vol. 1, Issue 1).
- Attamimi, D. F. & Lestari, Y. O. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. *AKUISISI : Jurnal Akuntansi*, 19(01), 118–130.
- Azzahra, S. F. & Kurniawan, A. (2025). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 141–150. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i3.5662>
- Hasri, E. T. & Djasri, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Mutu Layanan Kesehatan Dalam Era Jkn Di Provinsi Dki Jakarta: Studi Kasus Hipertensi Dengan Data Sistem Kesehatan (DASK). In *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* (Vol. 10, Issue 03).
- Israr, N. H. & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Issue 4). Online. <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Krisnanda, K. P. & Anwar, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4>
- Lukito, D., Qadaar, A., Mardikawati, B. & Susanti, M. (2024). *Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Akuntabilitas Kinerja Pada Lembaga Pemerintah*. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v10i2>
- Marselia, I. T. & Ardhiarisca, O. (2023). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Rsud Sidoarjo). *JAKED - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Mauliya, I., Haykal, M., Raza, H. & Yunita, N. A. (2024). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Bireuen*. 4. <https://doi.org/10.29103/jam.v%vi%oi.17439>
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Nia, M. I. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan



- Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas: Literature Review. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.56338/pjkm.v12i1.2393>
- Novianti, Sulistiyowati, N., Simarmata, Oster Suriani, Prasodjo, R. S., Anwar, A., Laelasari, E. & Irianto, J. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pis-Pk Di Puskesmas Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara Dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JAME)*, 20(1), 13–24.
- OECD. (2020). *Health at a Glance: Europe 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/82129230-en>
- Wangi, G. S. & Lasniroha, T. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Pemerintah Daerah Bandung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1). <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes>
- World Health Organization. (2020). *Global spending on health: rising to the pandemic's challenges*.
- World Health Organization. (2023). *Monitoring Health For the SDGs, Sustainable Development Goals*.